

# SentriS

**Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional**

published by  
Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
<http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris>

ISSN: 0216-5031

VOLUME 3 No. 1

Hal. 16 - 26

<https://doi.org/10.26593/sentris.v3i1.5062.16-26>

**Konflik Berkepanjangan Ethiopia: Sebuah Penghampiran Mediasi  
Ethiopia-Tigray**

**Bimo Pragilaksono**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan,*

*Indonesia*

[bimopragilaksono@gmail.com](mailto:bimopragilaksono@gmail.com)

## **Konflik Berkepanjangan Ethiopia: Sebuah Penghampiran Mediasi Ethiopia-Tigray**

Bimo Pragilaksono

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,  
bimopragilaksono@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pada 4 November 2020, Kawasan Tigray menjadi salah satu hotspot konflik mematikan di tengah situasi pandemi global Covid-19. Konflik ini berakar sejak Front Demokratik Rakyat Ethiopia (EPRDF), menjadi partai yang memerintah hampir 30 tahun lamanya yang dilatarbelakangi pemerintahan yang kotor, korup, dan diskriminatif terhadap minoritas. EPRDF berkoalisi dengan empat partai: Partai Demokrat Amhara (ADP); Partai Demokrat Oromo (ODP); Gerakan Partai Demokratik Rakyat Ethiopia Selatan (SEPDPM); serta Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Di antara keempat partai tersebut, hanya TPLF yang mendapat perhatian lebih dan memperoleh hak istimewa dari EPRDF. Keistimewaan ini memberikan TPLF pengaruh, posisi politik, dan sektor militer yang penting, yang membuat partai lainnya merasa dikucilkan. Gesekan politik, kekerasan seksual, dan bahkan isu pembersihan etnis Tigray mewarnai krisis Tigray yang pecah pada November 2020 lalu. Sejak Ahmed Abiy yang datang dari ODP menjadi perdana menteri baru Ethiopia, ia menunjukkan gerakannya yang signifikan terhadap TPLF. Kemudian, keterlibatan Eritrea di dalam konflik ini, semakin memperluas spektrum krisis. Kebuntuan solusi dan klaim sepihak atas keberhasilan (ofensif) Abiy dalam menangani TPLF, semakin menyudutkan posisi Tigray secara domestik, yang diperparah dengan penurunan kondisi masyarakat Tigray di tengah situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dalam esai ini, penulis akan menjelaskan bagaimana karakteristik konflik, metode penyelesaian mediasi, dan solusi yang memungkinkan untuk membangun situasi yang stabil dalam Konflik Tigray.

**Kata Kunci:** Abiy, Eritrea, Ethiopia, Tigray, TPLF.

### **ABSTRACT**

*On November, 4th 2020, the Tigrayan Area became one of the deadly conflict hotspots in the midst of the global pandemic Covid-19. The conflicts are rooted since the Ethiopian People's Democratic Front (EPRDF) became the governing party 30 years ago that reigned by corrupt, dirty, discriminate governance. EPRDF was in coalition with four parties: Amhara Democratic Party (ADP); The Oromo Democratic Party (ODP); Southern Ethiopian People's Democratic Party Movement (SEPDPM); and Tigrayan People's Liberation Front (TPLF). Among the four parties, only the TPLF has been promoted and acquired privileges by the EPRDF. These privileges provide TPLF an influence, an important political position and a military sector, which creates other parties feel excluded. Political friction, sexual violence, and even the issue of ethnic cleansing of Tigrayans, underlie during the crisis. Since Abiy Ahmed from ODP became the new PM of Ethiopia, it is strongly indicated that his position indirectly supports reprisal against TPLF. The involvement of Eritrea in this conflict, expanding the spectrum of crisis. Deadlock on the solution and the unilateral claims of the Abiy's successful (offensive) settlement against TPLF, agonizing the situation of Tigrayan people. Therefore, in this essay, the author will explain the characteristics of the current conflict situation, the ripeness of conflict, methods of resolution of mediation, and possible solutions to construct a stable situation in the Tigray Conflict.*

**Keywords:** Abiy, Eritrea, Ethiopia, Tigray, TPLF.

## Pendahuluan

Dalam kurun waktu 30 tahun ke belakang, konflik Ethiopia antara pemerintahan pusat di bawah PM Abiy Ahmed terhadap *Tigrayan's People Liberation Front* (TPLF) kembali pecah sejak 4 November 2020 lalu. Konflik ini bisa dicermati bahwa konteksnya, tidak jauh dari sejarah sosial politik Ethiopia dalam relasi antar etnisnya, terutama sejak *Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front* (EPRDF) menjadi kekuatan politik tunggal di era 1990 an. Posisi tersebut berhasil diraih, pasca EPRDF berhasil meredakan konflik bersaudara 1991, pasca digulingkan pemerintahan (Kol.) Mengistu Haile Mariam.<sup>1</sup> Mariam yang dikenal dengan pemerintahan junta militernya, bermuara pada ketidakadilan dan kesewenang-wenangannya selama memimpin Ethiopia. Pasca berhasil menggulingkan tampuk kekuasaan, EPRDF menduduki kursi pemerintahan dan Meles Zenawi (salah satu elit politik dari TPLF), ditunjuk sebagai perdana menteri pertama Ethiopia saat itu. Terhitung dari titik ini, hampir 30 tahun EPRDF telah berkuasa di Ethiopia. Dalam rezimnya ini, Zenawi memperkenalkan sebuah sistem otonomi etnis federal.<sup>2</sup> Otonomi ini didefinisikan sebagai kewenangan penguasaan terhadap wilayah kepada etnis apapun yang dilihat paling dominan di wilayah tersebut.<sup>3</sup> Dengan sistem pemerintahan seperti ini, tentu menghasilkan privilese tertentu bagi etnis yang paling dominan untuk memerintah dan potensi kekerasan struktural, menindas mereka yang berstatus minoritas. Dengan adanya kedekatan antara EPRDF dengan TPLF, membuat etnis Tigray mendapatkan privilese lebih dalam sektor politik serta penguasaan sektor militer. Dominasi kekuasaan menjadi sumber ketidakadilan yang dirasakan oleh partai-partai lain, seperti ADP, ODP, SEPDPM. Namun, kekuasaan Zenawi yang telah berlangsung selama 17 tahun itu, harus berhenti di mana pada tahun 2012 silam Zenawi ditemukan wafat di kantornya.<sup>4</sup>

Sepeninggalan Zenawi, hal ini berdampak pada kosongnya kekuasaan yang pada fase berikutnya, menimbulkan keretakan internal EPRDF dan meningkatnya protes massa untuk segera mereformasi pemerintahan.<sup>5</sup> Dalam momen inilah, Abiy Ahmed berhasil menduduki kursi pemerintahan dan dilantik menjadi perdana menteri pertama (yang datang dari etnis Oromo) pada tahun 2018. Namun, pemerintahan Abiy rupanya dihadapkan pada situasi di Ethiopia yang kembali memanas. Penerima Nobel Perdamaian 2019 ini, kembali harus menghadapi situasi tersulit Ethiopia, dimana konflik saudara kembali terjadi di tengah situasi pagebluk Covid-19. Pada dasarnya, konflik ini mempertemukan dua keinginan yang sama namun bertentangan, kedua pihak (disini penulis mengkubukan antara kubu pemerintah dengan TPLF) menginginkan keadilan. Di satu sisi pemerintah ingin menegakkan keadilan bagi seluruh etnis, dengan 'menghukum' kejahatan pemerintahan (oleh etnis) Tigray dalam sejarah dengan segala korupsi dan ketidakadilan di masa lalu. Sedangkan pihak TPLF menginginkan keadilan etnisnya di mata pemerintah, di mana dalam pemerintahan Abiy, seringkali TPLF dijadikan *scapegoat* dalam setiap kasus persengketaan korupsi atau dianggap

<sup>1</sup> Ineke Mules (17 November 2020), Ethiopia: A Timeline of the Tigray Crisis. Diakses dari <https://www.dw.com/en/ethiopia-a-timeline-of-the-tigray-crisis/a-55632181> pada 4 Juli 2021

<sup>2</sup> Reuters (6 November 2020), Timeline: Key Events leading to Ethiopia's Crisis in Tigray. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-conflict-timeline-idUSKBN27M109> pada 4 Juli 2021

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> David Smith (21 Agustus 2021), Ethiopia's Meles Zenawi dies of undisclosed illness. Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2012/aug/21/ethiopia-meles-zenawi-dies-illnesses> pada 25 Juli 2021.

<sup>5</sup> Temin, J. dan Yoseph Badwaza, Aspirations and Realities in Africa: Ethiopia's Quiet Revolution. *Journal of Democracy* 30, No. 3, 139-153, 2019. doi: 10.1353/jod.2019.0048

menjadi biang dari setiap permasalahan domestik yang terjadi di Ethiopia.<sup>6</sup> Tidak hanya itu, pihaknya juga menganggap, tindakan penundaan pemilihan umum pada Agustus 2020, disinyalir sebagai upaya Abiy untuk tetap berkuasa. Di tahun yang sama, Abiy pun terlihat mempertegas langkah politiknya terhadap TPLF, dengan membubarkan EPRDF serta membangun koalisi *Prosperity Party* (PP) dan mengajak TPLF bergabung yang kemudian jelas mendapat penolakan dari pihak TPLF.<sup>7</sup> Dampak dari tekanan-tekanan yang diterima TPLF, dapat kita lihat pada serangan mendadak pada 4 November 2020 yang dilancarkan TPLF terhadap pos *Ethiopian National Defence Force*—ENDF,<sup>8</sup> tepatnya di kawasan Mekelle, ibukota Tigray menjadi pemicu konflik berkelanjutan terjadi. Sebagai respon serangan tersebut, pemerintah pusat kemudian segera membangun pasukan gabungan dengan merangkul tentara Amhara dan tentara Eritrea. Dua pasukan dari dua wilayah ini menjadi langkah strategis Abiy untuk mengepung dan mempersempit pergerakan tentara loyal TPLF dari utara (Eritrea) dan selatan (Amhara) Tigray. Aliansi ini telah melakukan penetrasi pasukan ke dalam kawasan Tigray dan Abiy mengklaim bahwa telah berhasil menetralkan ketegangan TPLF.<sup>9</sup> Namun realitanya, pasukan gabungan masih melakukan invasi yang ofensif di wilayah Tigray. Dapat dilihat dari dampak nyata di antaranya, masyarakat Tigray harus mengalami pemadaman listrik yang berkelanjutan, kelaparan, gizi buruk, kacaunya arus obat-obatan maupun pengobatan terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 di Ethiopia sejak Agustus 2020.<sup>10</sup> Tidak berhenti di situ, terkonfirmasi pula peningkatan kasus pemerkosaan dari 36 kasus<sup>11</sup> hingga 136 kasus serta potensi *unreported case* yang terjadi lainnya.<sup>12</sup>

### Rumusan Masalah

Berangkat dari konteks historis sosio-politik antar etnis selama tiga dekade silam, TPLF yang pada awalnya memiliki kekuasaan dan privilese, kemudian seolah-olah menerima ‘serangan balasan’ atas ‘investasi dendam’ yang secara tidak langsung mereka lakukan selama TPLF memerintah. Aksi pemberontakan, kondisi perang saudara, maupun gambaran umum tentang ‘pembersihan etnis’ terlebih dalam situasi pandemi global Covid-19, seolah-olah dilegitimasi oleh pemerintahan Abiy Ahmed ketika ia menjabat sebagai PM. Di satu sisi, instruksi penyerangan yang dilakukannya terhadap TPLF, bertentangan dengan sikap humanis dan pasifis yang ia tunjukkan dalam penerimaan Penghargaan Nobel Perdamaian 2019 silam. Kekerasan struktural yang sedang dirasakan Tigray sekarang, berpotensi sebagai embrio terhadap protracted *social conflict*, yang mana tindakan perdamaian dalam jarak pendek akan menemui kesulitan tersendiri.

<sup>6</sup> Crisis Group (11 Februari 2021), Finding a Path to Peace in Ethiopia’s Tigray Region. Diakses dari <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/167-finding-path-peace-ethiopia-tigray-region> pada 4 Juli 2021

<sup>7</sup> Ineke Mules (17 November 2020), Ethiopia: A Timeline of the Tigray Crisis. Diakses dari <https://www.dw.com/en/ethiopia-a-timeline-of-the-tigray-crisis/a-55632181> pada 4 Juli 2021

<sup>8</sup> Michael Horton (24 Mei 2021), Tigray Defense Forces resist Ethiopian Army Offensive as Sudan, Eritrea, and Ethnic Militias enter the Fray. Diakses dari <https://jamestown.org/program/tigray-defense-forces-resist-ethiopian-army-offensive-as-sudan-eritrea-and-ethnic-militias-enter-the-fray/> pada 4 Juli 2021

<sup>9</sup> Aljazeera (4 Mei 2021), Eight Months of Ethiopia’s Tigray Conflict: A Timeline. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/4/six-months-of-ethiopia-tigray-conflict-a-timeline> pada 4 Juli 2021

<sup>10</sup> BBC (18 Januari 2021), Ethiopia Tigray Crisis: Fear of Mass Starvation. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-africa-55695123> pada 4 Juli 2021

<sup>11</sup> USAID (30 Maret 2021), Sexual Violence in Ethiopia’s Tigray Region.

<sup>12</sup> OHCHR, Ethiopia: Credible Record  
<https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26838&LangID=E>

Oleh karena itu, dalam esai akademik ini, penulis akan berfokus dalam mengeksplorasi dan memaparkan potensi metode penyelesaian konflik Tigray melalui mediasi. Mediasi penulis gunakan bertujuan untuk merangkul seluruh pihak yang terlibat konflik Tigray untuk duduk satu ruangan, ‘bertukar posisi’ (tidak terbatas pula pada) pembahasan *interests* dan *needs* dari masing-masing pihak yang berkonflik. Kemudian, akan dipaparkan juga mengenai definisi, karakter, serta penerapan mediasi dari perspektif Jacob Berkovitch serta Sara Horowitz. Dalam menganalisis konflik Tigray, penulis akan menggunakan kacamata *ripeness of conflict* sebagai acuan yang dapat melihat anatomi konflik tersebut yang di kemudian hari dapat menjadi acuan menuju terciptanya perdamaian antar pihak. Tidak berhenti di sana, lebih lanjut penulis akan mengurai keterlibatan dari siapa saja yang terlibat dalam konflik berdasarkan pendekatan PIN (*positions, interests, and needs*) *Approaches*, serta ditutup dengan kesimpulan serta solusi terhadap konflik Tigray.

## Landasan Teori

### a. Mediasi

Jacob Berkovitch dalam karyanya “Some Conceptual and Empirical Trends in the Study of Successful Mediation in International Relations” mendefinisikan mediasi sebagai sebuah proses pengelolaan konflik yang beriringan dengan proses negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik.<sup>13</sup> Dalam hal ini, Berkovitch menekankan keterlibatan pihak ketiga, dalam fungsinya sebagai penengah. Lebih lanjut, dalam “Mediation in International Conflicts: Theory, Practice, and Developments, di sini pihak ketiga (atau disebut sebagai) *outsider*, dipaparkan bahwa setidaknya tidak (jangan) berkepentingan terhadap konflik yang mereka tangani. Sehingga, mereka yang dipilih adalah entitas yang bersifat netral.<sup>14</sup> Berkovitch berpendapat di sini, bahwa selama pihak ketiga terlibat, kedua kubu dilarang saling memicu kontak fisik (kontak senjata) serta wajib mematuhi hukum internasional yang berlaku.<sup>15</sup>

Senada dengan ‘netralitas’ yang datang dari Berkovitch, Sara Horowitz dalam tesisnya “Mediation” mengulas kembali pentingnya netralitas pihak ketiga. Horowitz kemudian melihat lebih jauh bahwa dalam intervensi mereka di sini, setidaknya berasal dari mereka yang *unfamiliar* dengan konflik yang berlangsung dan bukan menjadi bagian dari konflik yang tengah berlangsung (dalam hal ini ia bukan dari faksi kedua kubu).<sup>16</sup> *Unfamiliar* di sini didefinisikan Horowitz sebagai sikap yang tidak berkepentingan dalam konflik selama mereka menengahi antar pihak yang bersengketa.<sup>17</sup> Namun, pandangan Horowitz terhadap sikap unfamiliar bukan diartikan sebagai sikap acuh atau bahkan tidak tahu menahu soal apapun yang sedang berlangsung di dalam konflik yang tengah berlangsung—sikap ini akan menjadi bumerang, karena mediator tidak memiliki dasar untuk mengenali karakteristik dari pihak yang berkonflik. Sehingga, Horowitz mengarahkan sikap mediator

<sup>13</sup> Berkovitch, J., J. Theodore Anagnoson, dan Donnette L. Wille, Some Conceptual Issues and Empirical Trends in the Study of Successful Mediation in International Relations. *Journal of Peace Research* 28, No. 1, hlm. 7-17. 1991. doi: 10.1177/0022343391028001003

<sup>14</sup> Berkovitch, J., Mediation in International Conflicts: Theory, Practice, and Developments, dalam I. William Zartman dan Jacob Blaustein (Eds.) *Peace Making in International Conflict: Methods & Techniques* (hlm. 163-189). Washington, DC.: United States Institute of Peace. 2007.

<sup>15</sup> *Ibid.* (hlm. 170)

<sup>16</sup> Horowitz, S., Mediation, dalam Charles Weibel dan Johan Galtung (Eds.), *Handbook of Peace and Conflict Studies* (hlm. 51-62). Oxon, OX: Routledge Publisher. 2007.

<sup>17</sup> *Ibid.* (hlm 52)

yang memiliki kedewasaan untuk dapat dipercaya, *unbiased* terhadap setiap gejala maupun pernyataan, dan yang utama yaitu netralitas.

#### a. *Ripeness of Conflict (RoC)*

Pada bagian ini, konsep RoC akan dipaparkan penulis melalui adopsi gagasan dari Karin Aggestam serta Richard Haass, guna memperdalam pemahaman umum untuk tercapainya sebuah gejala perdamaian dalam konflik Tigray. Karin Aggestam dalam tesisnya yang berjudul “Enhancing Ripeness: Transition from Conflict to Negotiation”, menjelaskan konsep RoC sebagai jembatan dari eskalasi konflik (melalui proses negosiasi) menuju de eskalasi. Melalui konsep inilah Aggestam menyebut aspek *timing* sebagai tahapan yang harus dicermati secara saksama supaya peka terhadap mengambil momentum yang tepat sebelum bertindak.<sup>18</sup> Aggestam juga menyebut RoC bersifat sangat *practical*—cenderung mendadak.<sup>19</sup> Sehingga, antar pihak mampu secara fleksibel merundingkan dan menetapkan komitmen yang pas.<sup>20</sup> Mereka pula harus memberikan komitmen yang konsisten untuk menuju kerjasama, sehingga semua pihak yang bersangkutan dapat memahami *needs*, sehingga dapat memicu alternatif lain dalam mencari penyelesaian konflik.

Sejalan dengan gagasan *timing* dari Aggestam, Richard Haass dalam tesis nya, “Ripeness and the Settlement of International Disputes”, menjabarkan bahwa RoC sebaiknya menjadi prioritas yang harus terpenuhi sebelum memasuki tahap negosiasi.<sup>21</sup> Untuk memperjelas gagasannya, Haass kemudian membagi proses menuju RoC ke dalam empat kondisi:<sup>22</sup> pertama, kedua belah pihak harus sepakat (secara sadar dan konsensual) untuk berunding. Kedua, pentingnya untuk mengamati dinamika kelompok. Haass melihat pentingnya peran pemimpin sebagai panutan yang dipatuhi oleh sebuah kelompok, kalau pemimpinnya tidak mampu dikelola, maka pengikutnya inilah yang akan membentuk opini-opini publik yang tentunya akan menggagalkan proses negosiasi. Sehingga, perlu pendekatan yang pas dan pantas untuk menaklukkan pemimpin ini. Ketiga, ketika pihak yang berkonflik terbujuk untuk menuju ke arah negosiasi, maka pentingnya untuk membangun kepercayaan di antara mereka dengan memberi jaminan. Jaminan ini penting agar mereka tidak merasa dikekang untuk mengekspresikan kepentingannya. Keempat, berkaitan dengan proses sebelumnya, Haass juga menyebut kembali bahwa jaminan dalam negosiasi tersebut bersifat fleksibel. Artinya, selama proses negosiasi yang berlangsung, harus ada peluang bahwa negosiasi dapat berakhir tanpa kesepakatan. Proses ini penting karena, dalam negosiasi yang cenderung kaku, keputusan ideal tidak akan tercapai dan akan mempersempit ruang gerak negosiator dalam *bargaining*. Sehingga, perlu dipastikan bahwa tidak ada aturan yang kaku yang akan memaksakan keputusan.

### Analisis Anatomi Konflik

#### a. Menuju Pintu Perdamaian

Situasi konflik Tigray menunjukkan bahwa perdamaian belum pasti dicapai dalam waktu pendek. Menurut pandangan penulis, komposisi dari RoC itu sendiri belum tercipta di dalam anatomi

<sup>18</sup> Aggestam, K., *Enhancing Ripeness: Transition from Conflict to Negotiation*, dalam I. William Zartman dan Guy Olivier Faure (Eds.), *Escalation and Negotiation in International Conflicts* (hlm. 271-288). Cambridge: Cambridge University Press. 2005.

<sup>19</sup> *Ibid.* (hlm. 276)

<sup>20</sup> *Ibid.* (hlm. 278)

<sup>21</sup> Haass, R. N., *Ripeness and the Settlement of International Disputes*. *Survive: Global Politics and Strategy* 30, No. 3, 232-251. 2008. doi: 10.1080/00396338808442409

<sup>22</sup> *Ibid.* (hlm. 234)

konflik Tigray ini, bahkan kemungkinan untuk dibangunnya RoC dalam waktu singkat sangat kecil. Penulis akan mengadopsi empat kondisi dari gagasan Richard Haas. Indikasi bahwa belum adanya RoC dalam konflik ini, **pertama** dapat kita lihat dari belum terciptanya bentuk kesepakatan resmi (secara sadar) dari kedua belah pihak (TPLF dan pemerintah) untuk berunding. Diklaim bahwa, dari pihak TPLF, mereka mengakui telah mengajukan permohonan berbincang dengan pemerintah untuk meredakan tensi antar pihak.<sup>23</sup> Di sisi lain, pemerintah Abiy justru menolak dan malah ingin mempertahankan keberhasilan mereka dalam ‘merangsek’ ke wilayah Tigray.<sup>24</sup> **Kedua**, belum terjadinya upaya ‘pembujukan’ apapun yang datang dari pemimpin kelompok (Dobretsion Gebremichel) secara damai. Klaim Abiy secara sepihak tentang mendamaikan situasi pada 6 November 2020, bertentangan dengan realita. Abiy belum menunjukkan ‘penaklukan’ yang baik terhadap pemimpin di Tigray, dan sebaliknya malah memperkeruh relasi masyarakat loyalis TPLF untuk menyerang pasukan gabungan pemerintah. Kemudian, kesepakatan *ceasefire* yang belum terealisasi bahkan belum jelas yang diutarakan dari pemerintah pusat tidak diakui oleh pihak Tigrayans, karena rasa skeptis mereka terhadap pemerintah yang tidak tepat janji untuk menarik pasukan dari kawasan Tigray dengan klaim peningkatan kasus kekerasan (terutama seksual) akibat masih adanya pasukan gabungan di Tigray.<sup>25</sup> **Ketiga**, karena pada bagian ini Haass mulai beranjak ke dalam praktik negosiasi, dengan realita di lapangan beserta tindak kekerasan yang masih terjadi, maka secara tidak langsung proses negosiasi yang idealnya datang secara sadar dan sukarela dari kedua belah pihak tentu gagal dicapai. **Keempat**, kita harus melihat bahwa adanya jaminan dari proses negosiasi yang berlangsung memungkinkan untuk berakhir tanpa sebuah kesepakatan. Namun, berangkat dari iklim konflik yang belum memungkinkan untuk menuju negosiasi, sehingga dalam prasyarat keempat ini secara otomatis belum dapat dipenuhi.

#### a. Para Aktor

Dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Ethiopia, pemerintah pusat sedemikian rupa bekerja sama dengan aktor-aktor yang dinilai strategis untuk menangani tentara loyal TPLF dan meredakan tensi konflik dengan TPLF. Konflik ini tidak hanya melibatkan aktor domestik saja, setidaknya disini terdapat tiga aktor domestik serta satu aktor dari negara tetangga Ethiopia yang terlibat. Di antaranya yakni: pertama Tigrayan’s People Liberation Front (TPLF); **Amhara** (Amhara Democratic Party); Pemerintah Ethiopia (di bawah PM **Abiy Ahmed**); serta **Eritrea**. Dengan peranan para aktor tersebut dalam konflik, pada bagian ini, penulis akan menggunakan PIN *approach* (*positions, interests, serta needs*) dalam memaparkan keempat aktor tersebut. Sebelumnya, pendekatan PIN ini menjadi alat analisis konflik dari Simon Fisher (et. al.) dalam karya mereka yang berjudul “Working with Conflict 2: Skills and Strategies for Action”. Dalam karyanya, mereka memaparkan ketiga aspek dari PIN *approach* untuk menganalisis<sup>26</sup> apa posisi (yang terlihat di permukaan) bahwa dimana *stance* antar pihak ini berada. Kemudian, untuk mengetahui kepentingan lain yang melatari, dapat dilihat melalui penjabaran *interest* (yang tidak terlihat di permukaan), bahwa

<sup>23</sup> Aljazeera (4 Mei 2021), Eight Months of Ethiopia’s Tigray Conflict: A Timeline. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/4/six-months-of-ethiopia-tigray-conflict-a-timeline> pada 4 Juli 2021

<sup>24</sup> Michael Horton (24 Mei 2021), Tigray Defense Forces resist Ethiopian Army Offensive as Sudan, Eritrea, and Ethnic Militias enter the Fray. Diakses dari <https://jamestown.org/program/tigray-defense-forces-resist-ethiopian-army-offensive-as-sudan-eritrea-and-ethnic-militias-enter-the-fray/> pada 4 Juli 2021

<sup>25</sup> Aljazeera (29 Juni 2021), Tigray Rebels vow to drive out ‘Enemies’ after retaking Mekelle. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2021/6/29/tigray-rebels-vow-to-drive-out-enemies-despite-ceasefire> pada 25 Juni 2021.

<sup>26</sup> Simon Fisher, et. al., *Working with Conflict 2: Skills and Strategies for Action* (hlm. 27-29). London: Zed Books Limited. 2000.

ini merupakan cara yang dilewati untuk mencapai *needs*. Secara tidak langsung, *interest* menjembatani *position* dengan *needs*. Dan yang ketiga, yakni *needs* (yang tidak terlihat di permukaan). *Needs* dipahami sebagai sesuatu hal yang pada dasarnya ingin diperjuangkan oleh antar pihak yang berkonflik supaya eksistensi mereka tetap jelas dan ada. Ketiga hal ini perlu dilihat ke dalam tindak-tanduk antar pihak yang berkonflik, sehingga mampu membantu antar pihak yang berkonflik untuk menyentuh akar permasalahan yang menyebabkan konflik kembali meradang. Mengenali akar permasalahan esensial akan membuat konflik semakin terkendali serta mengurangi tingkat bias selama konflik berlangsung.

**I. TPLF:** pada bagian sebelumnya, TPLF telah disinggung mengenai sepak terjang mereka semasa memerintah Ethiopia pada era 1990-an di bawah Zenawi. Akibatnya, pasca protes reformasi, TPLF hingga konflik ini terjadi berada di posisi tersulit mereka yang membuat terjadinya marginalisasi eksistensi, sosio-politik terhadap Tigrayans. Dengan adanya pemberontakan 4 November 2020, TPLF jelas menunjukkan posisi mereka yang kontra dengan pemerintah. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya dalam esai ini, TPLF merasakan adanya bentuk ketidakadilan yang mulai mereka rasakan pasca terpilihnya Abiy Ahmed, sehingga kondisi ini dapat dilihat sebagai cara mereka supaya *needs* mereka tercapai. TPLF dalam konflik ini, mereka pada dasarnya memperjuangkan eksistensi, dengan memerangi bentuk-bentuk ketidakadilan yang mereka lihat dari dalam pemerintahan Abiy Ahmed.

**II. Amhara,** atau ADP (dalam konteks politik): dalam konflik ini, mereka menempatkan diri sebagai oposan TPLF, di mana pasca terpinggirnya mereka akibat dominasi politik selama TPLF memerintah. Reformasi pemerintahan mendukung mereka untuk mulai menekan TPLF, terlebih pasca perdana menteri baru datang dari kalangan non-TPLF. Setelah mereka direkrut pemerintah pusat bergabung untuk mengepung TPLF, secara tidak langsung *needs* mereka terakomodasi untuk menghancurkan TPLF. Amhara seolah-olah terlegitimasi untuk menindas Tigrayans melalui mandat pemerintah pusat. Amhara yang berada tepat di selatan Tigray, secara efektif dapat membantu pemerintah untuk mengepung dan mengunci Tigray dari selatan. Di sini tentara Amhara bekerja sama dengan tentara Eritrea ke dalam tentara gabungan dalam operasi militer selama konflik ini berlangsung.

**III. Abiy Ahmed:** Abiy berperan sebagai pihak oposan dalam konflik ini. Sebagai PM yang datang dari kalangan non-TPLF (dari ODP), Abiy mulai mempertegas posisinya terhadap TPLF—dengan istilah ‘menghukumnya’. ‘Penghukuman’ ini diartikan oleh Abiy sebagai upaya pemerintah untuk memperjuangkan keadilan di masa TPLF mendominasi kursi kekuasaan tiga dekade silam. Dalam hal ini dapat dilihat, melalui manuver politiknya, Abiy menggunakan konteks historis Ethiopia ketika TPLF menduduki tampuk kekuasaan. Walaupun dalam konflik ini ‘perang’ dinyatakan oleh serangan TPLF, namun tidak dapat dipungkiri bahwa, melalui ‘penghukuman’ oleh Abiy, menandai terjadinya kekerasan struktural terhadap Tigrayans akibat kesalahan lama mereka. seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa diklaim adanya bentuk pamarjinalan dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah dengan penuduhan, tidak mendapat posisi setara dalam perpolitikan, hingga penundaan pemilihan umum Agustus 2020 yang didefinisikan sebagai upaya memperpanjang ‘penyiksaan’ pemerintahan Abiy terhadap Tigrayans. Abiy pula terlihat menunjukkan dualismenya dalam merespon pertanyaan internasional terkait perkembangan konflik. Pasca invasi militer pertama kali di Mekelle, secara sepihak Abiy mengklaim kemenangan dan berhasil mendamaikan Tigray.



Namun, perkembangan situasi menggambarkan tingkat kejenuhan yang tinggi disertai kekerasan seksual.

**IV. Eritrea:** menjadi pihak eksternal yang terlibat dalam konflik Tigray, bergabung dalam pasukan gabungan (dengan tentara wilayah Amhara dan ENDF) untuk mengepung dan menyerang TPLF dari sisi utara. Terlibatnya Eritrea, di satu sisi dapat dilihat sebagai bentuk permintaan bantuan pemerintah Ethiopia yang terdesak akibat serangan mendadak TPLF—demi mengamankan keamanan masyarakat dan kedaulatan Ethiopia. Namun, tidak dapat dipungkiri pula, bahwa Eritrea memiliki dinamika relasi antara Eritrea-Ethiopia maupun dengan Tigray dalam konflik-konflik sebelumnya. Pada masa kemerdekaan yang beriringan dengan jatuhnya pemerintahan Kol. Mengistu dengan bantuan tentara Tigray, yang berdampak pecahnya Ethiopia dan terbentuk kawasan yang dikenal sebagai Eritrea. Namun, relasi berubah ketika Eritrea terlibat pada konflik perbatasan Ethiopia (yang berbatasan langsung dengan Tigray—pada Mei 1998) di mana tentara EPLF (*Eritrean People's Liberation Front*) dan TPLF (yang mewakili Ethiopia) dipertemukan kembali dalam konflik dalam konteks mempertahankan kedaulatan.<sup>27</sup> Namun, dalam waktu ini, Eritrea melihat adanya tindakan ekspansionis TPLF yang justru membahayakan kedaulatannya. Tidak hanya dalam konteks materiil, secara moral TPLF seolah-olah ingin menanamkan pengaruh mereka terhadap penduduk di sekitar perbatasan.<sup>28</sup> Beranjak dari titik ini, Eritrea jelas menunjukkan posisi kontra mereka terhadap militan TPLF bahwa, dampak buruk dari kecenderungan Tigray saat itu yang agresif-ekspansionis akan berpotensi terulang terhadap Ethiopia apabila disikapi tanpa tindakan tegas. Namun, di samping itu, terdapat indikasi pula bahwa tentara Eritrea memperdagangkan senjata mereka terhadap pihak pemberontak (yang tentu disangkal pemerintah Eritrea) yang diduga melebarkan spektrum dan durasi konflik.<sup>29</sup>

#### **b. Mediasi**

Berdasarkan situasi konflik yang tengah berlangsung, upaya penyelesaian konflik melalui mediasi penulis angkat, mengingat adanya situasi darurat (kemanusiaan—warga Tigray) serta kecenderungan ofensif-agresif ditunjukkan baik dari kubu pemerintah maupun militan TPLF, sehingga perlunya dibangun intervensi pihak ketiga sebagai penengah. Dapat dilihat bahwa intensitas Konflik Tigrayans semakin meningkat, di mana TPLF kembali meminta penarikan pasukan gabungan pemerintah Ethiopia secara total dari Tigray—mengingat usulan perundingan pertama kali diajukan TPLF pasca pengerahan pasukan gabungan pemerintah ke Mekelle.<sup>30</sup>

Perihal penerapan metode mediasi sebagai rancangan menuju perdamaian konflik, di sini penulis memberi perhatian terhadap beberapa faktor agar mediasi mampu berjalan dengan ideal,<sup>31</sup> di antaranya pertama, dengan mengamati dan menilai intensitas konflik yang tengah berlangsung. Konflik Tigray masih menampilkan intensitas tingginya, di mana keterlibatan aktor di luar wilayah negara (Eritrea), terutama dalam hubungannya dengan pembentukan pasukan gabungan serta dalam

<sup>27</sup> Reid, R., Old Problems in New Conflicts: Some Observations on Eritrea and its Relation with Tigray, from Liberation struggle to Inter-State War. *Africa* 73, 369-401, 2003. doi: 10.3366/afr.2003.73.3.369

<sup>28</sup> *Ibid.* (hlm. 394)

<sup>29</sup> BBC (28 Desember 2020), Tigray Crisis: Eritrea's role in Ethiopian Conflict. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-africa-55295650> pada 4 Juli 2021

<sup>30</sup> Aljazeera (4 Juli 2021), TPLF lays out Conditions for Truce Talks with Ethiopian Gov't. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/4/tplf-conditions-tigray-ceasefire-talks-ethiopia-government> pada 4 Juli 2021

<sup>31</sup> Berkovitch, J., Mediation in International Conflicts: Theory, Practice, and Developments, dalam I. William Zartman dan Jacob Blaustein (Eds.) *Peace Making in International Conflict: Methods & Techniques* (hlm. 163-189). Washington, DC.: United States Institute of Peace. 2007.

beberapa situasi, TPLF pun melancarkan roket ke Asmara.<sup>32</sup> Hal ini tidak hanya memperluas spektrum konflik yang hanya dalam konteks domestik, melainkan keterlibatan Eritrea juga berpotensi membahayakan penduduk Eritrea. Kedua, melihat dari karakteristik konflik, krisis Tigray cenderung faksional. Dalam konteks historis hubungan, relasi TPLF dan para aktor lainnya cenderung destruktif dan saling membenci (ADP-TPLF; EPLF-TPLF, pemerintah pusat-TPLF). Bentuk sinisme komunal maupun mispersepsi terhadap TPLF, akan memunculkan kembali tekanan terhadap TPLF, yang berpotensi pada pola resiliensi dari pihak TPLF untuk memperjuangkan eksistensi mereka dan perdamaian yang berkepanjangan akan sulit tercapai. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, mediasi akan menemui hambatan tersendiri.

Menghadapi situasi konflik yang sudah mengarah pada isu kemanusiaan, idealnya akan membuat kedua belah menemui bentuk titik ‘kebuntuan konflik’, di mana kedua kubu menyadari bahwa penyerangan berlarut-larut tidak akan menemui solusi dan malah akan menambah *costs* baik materiil hingga moral. Sehingga, upaya gencatan senjata menjadi langkah permulaan yang harus diakui terhadap satu sama lain, mengingat TPLF cenderung skeptik terhadap upaya penarikan pasukan gabungan pemerintah yang rupanya bertentangan dengan realita lapangan. Pembentukan *trust* terhadap pemerintah pusat Ethiopia, merupakan hal krusial yang perlu dikerjakan dalam tempo singkat serta memaksimalkan peluang. Apabila, pemenuhan prekondisi tersebut terjadi serta kesadaran antar pihak untuk melakukan mediasi, dalam titik ini, mediator dapat mengundang para pihak untuk duduk satu ruangan. Adapun tema pembahasan dalam mediasi ini akan membahas posisi, *interests*, dan *needs*, memberikan kesamaan berpikir terhadap substansi pembahasan perdamaian, serta mengakomodasi ekspresi dan fleksibilitas selama mediasi terhadap kedua kubu dalam substansi yang dibahas. Tidak hanya didukung melalui faktor internal untuk menuju keberhasilan mediasi konflik, implementasi dari komitmen penghentian kontak fisik antar kubu, sangat dibutuhkan demi berjalannya proses perdamaian Konflik Tigray.

### **Kesimpulan**

Secara anatomi, konflik Tigray merupakan bentuk luka lama dalam Ethiopia, yang diakibatkan oleh rekam jejak TPLF selama memerintah 30 tahun silam. Konflik akan tetap terjadi jika masih ada ambisi pemerintahan Abiy Ahmed untuk memberi ‘hukuman’ terhadap TPLF. Konflik ini merupakan bentuk kebencian lama, frustrasi kolektif terhadap TPLF, dan seolah-olah konflik ini mencoba menampilkan bentuk kekerasan struktural. Walaupun di satu sisi, kekecewaan telah diimplementasikan pertama kali lewat serangan mendadak 4 November 2020 oleh TPLF. Serangan tersebut kemudian didefinisikan oleh pemerintah sebagai pemberontakan yang mengancam kedaulatan Ethiopia sebagai negara yang merdeka. Pemerintah membutuhkan perhatian lebih terhadap penyusunan ulang aturan, atau dalam istilah dari Abiy Ahmed sebagai ‘hukuman’ terhadap TPLF, bukan hanya dosa di masa pemerintahan mereka terdahulu, melainkan terhadap tindakan teror mereka dalam negeri. Keterlibatan para aktor di sini pada dasarnya memiliki kesamaan hubungan, yaitu relasi mereka dengan TPLF. Sehingga, ini menjadi momentum dalam rangka legitimasi pemerintah untuk kewenangan menyerang TPLF maupun sebagai bantuan akibat pengalaman sejarah.

Dalam esai ini pula penulis memaparkan metode mediasi sebagai langkah konkrit yang dapat dilakukan antar kubu sebagai langkah menuju perdamaian. Namun, prekondisi yang berbentuk

---

<sup>32</sup> Ineke Mules (17 November 2020), Ethiopia: A Timeline of the Tigray Crisis. Diakses dari <https://www.dw.com/en/ethiopia-a-timeline-of-the-tigray-crisis/a-55632181> pada 4 Juli 2021

kesepakatan bilateral harus terpenuhi terlebih dahulu—Abiy dan TPLF, yang paling dekat adalah dengan menunjukkan komitmen. Kepastian pemerintah dalam menarik total pasukan gabungan dari wilayah Tigray dan TPLF menjamin tidak akan terjadinya kembali kesempatan serangan mendadak dan pemberontakan di tengah celah penarikan pasukan harus ditunjukkan dengan serius. Apabila tahap tersebut tercapai, langkah selanjutnya yakni pemerintah secara konkrit menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Tigray yang terdampak, memastikan kecukupan pangan, serta ketersediaan obat dan sarana medis terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19. Langkah kedua merupakan upaya *trust building* pemerintah terhadap TPLF, sehingga TPLF terbujuk dalam upaya menciptakan dialog yang membangun dengan pemerintah. Jika dialog ini tercapai, mulai dari sana jaminan-jaminan yang menjanjikan dan non-ofensif dapat menjadi tawaran selanjutnya yang ditawarkan Abiy.

### Daftar Pustaka

- Aggestam, K. *Enhancing Ripeness: Transition from Conflict to Negotiation*, dalam I. William Zartman dan Guy Olivier Faure (Eds.), *Escalation and Negotiation in Internasional Conflicts*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Aljazeera, *Eight Months of Ethiopia's Tigray Conflict: A Timeline*. <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/4/six-months-of-ethiopia-tigray-conflict-a-timeline> [diakses pada 4 Juli 2021]
- Aljazeera, *Tigray Rebels vow to drive out 'Enemies' after retaking Mekelle*. <https://www.aljazeera.com/news/2021/6/29/tigray-rebels-vow-to-drive-out-enemies-despite-ceasefire> [Diakses pada 25 Juni 2021]
- Aljazeera, *TPLF lays out Conditions for Truce Talks with Ethiopian Gov't*. <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/4/tplf-conditions-tigray-ceasefire-talks-ethiopia-government> [diakses pada 4 Juli 2021]
- BBC, *Ethiopia Tigray Crisis: Fear of Mass Starvation*. <https://www.bbc.com/news/world-africa-55695123> [diakses pada 4 Juli 2021]
- BBC, *Tigray Crisis: Eritrea's role in Ethiopian Conflict*. <https://www.bbc.com/news/world-africa-55295650> [diakses pada 4 Juli 2021]
- Berkovitch, J. (2007), *Mediation in International Conflicts: Theory, Practice, and Developments*, dalam I. William Zartman dan Jacob Blaustein (Eds.) *Peace Making in International Conflict: Methods & Techniques*. Washington, DC.: United States Institute of Peace.
- Berkovitch, J., J. Theodore Anagnoson, dan Donnette L. Wille, *Some Conceptual Issues and Empirical Trends in the Study of Successful Mediation in Internasional Relations*.
- Crisis Group, *Finding a Path to Peace in Ethiopia's Tigray Region*. <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/167-finding-path-peace-ethiopia-tigray-region> [diakses pada 4 Juli 2021]
- David Smith, *Ethiopia's Meles Zenawi dies of undisclosed illness*. <https://www.theguardian.com/world/2012/aug/21/ethiopia-meles-zenawi-dies-illness> pada 25 Juli 2021. [Diakses pada 25 Juli 2021].
- Fisher, S., et. al. (2000), *Working with Conflict 2: Skills and Strategies for Action*. London: Zed Books Limited.

Ineke Mules, *Ethiopia: A Timeline of the Tigray Crisis*. <https://www.dw.com/en/ethiopia-a-timeline-of-the-tigray-crisis/a-55632181> [diakses pada 4 Juli 2021]

Horowitz, S. (2007), *Mediation*, dalam Charles Webel dan Johan Galtung (Eds.), *Handbook of Peace and Conflict Studies*. Oxon, OX: Routledge Publisher.

Haass, R. N., Ripeness and the Settlement of International Disputes.

Michael Horton, *Tigray Defense Forces resist Ethiopian Army Offensive as Sudan, Eritrea, and Ethnic Militias enter the Fray*. <https://jamestown.org/program/tigray-defense-forces-resist-ethiopian-army-offensive-as-sudan-eritrea-and-ethnic-militias-enter-the-fray/> [diakses pada 4 Juli 2021]

OHCHR, *Ethiopia: Credible Record*  
<https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26838&LangID=E> [diakses pada 4 Juli 2021]

Reid, R., Old Problems in New Conflicts: Some Observations on Eritrea and its Relation with Tigray, from Liberation struggle to Inter-State War.

Reuters, *Timeline: Key Events leading to Ethiopia's Crisis in Tigray*.  
<https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-conflict-timeline-idUSKBN27M1O9> [diakses pada 4 Juli 2021]

Temin, J. dan Yoseph Badwaza, Aspirations and Realities in Africa: Ethiopia's Quiet Revolution.

USAID, Sexual Violence in Ethiopia's Tigray Region